



B D F

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN 2025

PT BALI KERTHI DEVELOPMENT FUND VENTURA



www.bdf.co.id |



bkdventura@bdf.co.id |



[balikerthidevelopmentfund](https://www.instagram.com/balikerthidevelopmentfund)

Jl. Diponegoro No. 150 Komplek IDT/ Genteng Biru Blok B 23-24 Denpasar – 80114

DEWAN KOMISARIS

PT BALI KERTHI DEVELOPMENT FUND VENTURA

Menyetujui :


RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN
TAHUN 2025

Disetujui

DEWAN KOMISARIS



I KETUT WIDIANA KARYA
Komisaris Utama



NGAKAN PUTU MIHARJANA
Komisaris

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang	1
Visi Misi Keuangan Berkelanjutan	2
Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	2
Road Map Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	3
Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan	5

BAB II PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Rujukan yang Digunakan Sebagai Acuan	6
Proses Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	6

BAB III FAKTOR PENENTU RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Rencana Strategi BDF	7
Kapasitas Organisasi Saat ini	7
Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis Saat ini	10
Strategi Komunikasi	13
Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Mitigasi	15
Kerjasama Dengan Pihak Eksternal	15

BAB IV PRIORITAS DAN URAIAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Dasar Pemikiran	16
Kegiatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	18
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	19
Sumber Daya	20
Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program	22

BAB V TINDAK LANJUT RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

PIC Penanggung Jawab Monitoring & Evaluasi Aksi Keuangan Berkelanjutan	23
Penentuan Waktu untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	23
Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	24
Mitigasi Risiko	24

BAB VI PENUTUP

Penutup	27
---------	----

1.1 Latar Belakang

Dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan dan mendukung Roadmap Keuangan Berkelanjutan Negara Indonesia, diperlukan adanya pendekatan dan kerja sama secara menyeluruh dari berbagai sektor dan industri. Dukungan tersebut salah satunya dari sektor lembaga jasa keuangan yang memiliki fungsi sebagai penghimpun dana, penyalur pembiayaan, maupun investasi. Dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan, Perusahaan diwajibkan untuk membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) guna mendorong kesadaran terhadap isu keberlanjutan (Lingkungan, Sosial, Tata Kelola/LST) dan berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Negara. PT Bali Kerthi Development Fund Ventura (BDF) sebagai salah satu perusahaan modal ventura, sangat memahami eratnya hubungan antara tingkat kesejahteraan dengan kelestarian lingkungan sekitar dan eratnya hubungan antara tingkat kesejahteraan dengan masalah-masalah sosial. Oleh karenanya, perusahaan mendukung penuh upaya Pemerintah Indonesia untuk memenuhi komitmennya dalam mencapai berbagai tujuan keberlanjutan. BDF berkomitmen untuk memberikan nilai di setiap siklus bisnis dan pasar dalam proses penciptaan hasil terbaik untuk menjadi perusahaan yang bertanggung jawab sosial.

BDF termasuk dalam kategori Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB) dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga BDF

memiliki kewajiban untuk menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) berdasarkan POJK No.51/OJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

BDF senantiasa berkomitmen untuk mempertahankan posisinya dan terus melakukan pengembangan bisnis yang sudah dirancang dari tahun-tahun sebelumnya demi masa depan yang lebih baik. Penerapan keuangan berkelanjutan juga terus dilakukan dengan skala prioritas pada penyesuaian antara risiko sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam aktivitas bisnis, serta melanjutkan pengembangan kapasitas intern melalui lanjutan pelatihan pengembangan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia.

Kami percaya bahwa bisnis yang dijalankan dengan tujuan mulia serta model bisnis yang sesuai dan dapat bersaing dengan kebutuhan masa depan akan menghasilkan kinerja yang baik sesuai harapan kami yang tertuang dalam RAKB tahun 2025.



1.2 Visi, Misi Keuangan Berkelanjutan PT Bali Kerthi Development Fund Ventura (BDF)

BDF telah menyusun visi dan misi khusus untuk implementasi keuangan berkelanjutan. Visi Misi ini merupakan perluasan dari visi misi perusahaan, dan selanjutnya seluruh kegiatan yang direncanakan dalam RAKB menjadi bentuk komitmen BDF akan visi misi tersebut

Visi Utama

Menjadi lembaga pembiayaan alternatif terbaik dan terpercaya bagi usaha kecil, menengah dan koperasi dalam pelayanan jasa keuangan dan konsultasi manajemen yang ada di daerah Bali dalam mendukung transformasi ekonomi Bali

Misi Utama

Menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas serta semangat kewirausahaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar dapat menjadi pengusaha yang tangguh, mandiri, dan meningkatkan nilai tambah investasi pemegang saham dalam mendukung transformasi ekonomi Bali menuju Bali era baru: maju, hijau, tangguh, sejahtera dan berkelanjutan.

Visi Keuangan Berkelanjutan

Menjadi lembaga pembiayaan alternatif terbaik dan terpercaya bagi usaha kecil, menengah dan koperasi dalam pelayanan jasa keuangan dan konsultasi manajemen yang ada di daerah Bali serta memperhatikan kelestarian lingkungan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan

Misi Keuangan Berkelanjutan

Dalam upaya mewujudkan visi keuangan berkelanjutan, BDF memiliki misi keuangan berkelanjutan yang juga merupakan misi utama BDF yaitu menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas serta semangat kewirausahaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar dapat menjadi pengusaha yang tangguh, mandiri, dan meningkatkan nilai tambah investasi pemegang saham dalam mendukung transformasi ekonomi Bali menuju Bali era baru: maju, hijau, tangguh, sejahtera dan berkelanjutan.

1.3 Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Pencapaian visi dan misi keuangan berkelanjutan sebagaimana diuraikan sebelumnya dengan memperhatikan serta mempertimbangkan berbagai aspek antara lain kapasitas organisasi, aspek teknis pelaksanaan hingga keuangan. Bagi BDF, keberlanjutan merupakan bagian dari komitmen dalam mewujudkan visi dan misi, serta untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan.

RKAB adalah alat yang penting bagi BDF untuk membangun bisnis yang berkelanjutan & berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan menyusun dan melaksanakan RAKB, perusahaan dapat menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan.



1.4 Road Map Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

BDF menerapkan langkah strategis dalam upaya internalisasi prinsip Aksi Keuangan Berkelanjutan yang terdiri dari beberapa tahap antara lain :

- 1) Tahap I, yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang merupakan **Tahap Awal atau Tahap Persiapan**
- 2) Tahap II, yang dilaksanakan tahun 2021 s.d 2022 yang merupakan **Tahap Implementasi**
- 3) Tahap III, yang dilaksanakan tahun 2023 s.d 2024 yang merupakan **Tahap Implementasi Lanjutan**
- 4) Tahap IV, ditargetkan pada tahun 2025 yang merupakan **Tahap Implementasi Penuh** dimana PT Bali Kerthi Development Fund Ventura menargetkan dapat mencapai visi dan misi keuangan berkelanjutan.

1.4.1 Rencana 5 Tahunan

Tabel 1.1 Rencana 5 Tahunan Aksi Keuangan Berkelanjutan

No	Tahun	Target Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan
1	2020	Penunjukan Bagian Manajemen Risiko untuk pembuatan laporan RAKB maupun laporan keberlanjutan dibantu oleh Divisi Investasi, Divisi HRD, Bagian Akunting, dan Administrasi Investasi.	Surat Keputusan (SK) Direksi tentang penunjukan serta tugas dan tanggung jawab tim khusus pembuat laporan pelaksana keuangan berkelanjutan.
		Penyusunan Pedoman Perusahaan tentang Keuangan Berkelanjutan.	PP Keuangan Berkelanjutan telah disetujui Direksi dan Dewan Komisaris.
		Alokasi dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dimasukkan dalam RBT perusahaan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris	Direksi dan Dewan Komisaris menyetujui RBT tersebut.
2	2021	Pelaksanaan edukasi baik yang dilakukan secara internal atau bekerjasama dengan regulator, lembaga/instansi terkait ataupun dengan ventura lainnya	Pelatihan Penyusunan RAKB dan pelatihan Pelaporan Keberlanjutan kepada petugas yang telah ditunjuk BDF. Sebanyak 20% dari total pengurus dan pejabat eksekutif mengikuti pelatihan training lingkungan hidup tingkat dasar atau pelatihan sejenisnya
			Realisasi TJSL kepada katagori kegiatan usaha berkelanjutan sebanyak 10%



No	Tahun	Target Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan
3	2022	Penyusunan pedoman internal yang mendukung praktek ramah lingkungan dalam kegiatan operasional BDF	SK Direksi yang wajib dilaksanakan di lingkungan perusahaan
		Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mengelola fungsi keuangan berkelanjutan	Sebanyak 40% dari total pengurus, pejabat eksekutif dan <i>Venture Capital Officer</i> (VCO) telah mengikuti pelatihan tentang keuangan berkelanjutan dan sejenisnya
4	2023	Inisiasi portofolio produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan	Disesuaikan dengan sumber dana yang ada BDF
		Pelaksanaan edukasi eksternal	Edukasi kepada debitur katagori kegiatan usaha berkelanjutan
5	2024	Pengembangan portofolio produk dan/jasa keuangan berkelanjutan	Disesuaikan dengan sumber dana yang ada di BDF
		Menyusun sistem pengawasan dan pelaporan penerapan keuangan berkelanjutan.	SK Direksi
6	2025	Melakukan kajian-kajian terkait : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesesuaian produk dan/atau jasa yang sudah ada dengan kriteria kegiatan usaha ▪ Permintaan pasar terhadap produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan 	Telah dilakukan kajian terhadap pembiayaan usaha yang ada dan hasilnya dijadikan sebagai acuan pembuatan SOP

1.4.2 Rencana 1 Tahunan

Tabel 1.2 Rencana 1 Tahunan Aksi Keuangan Berkelanjutan

Tahun	Target Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan
2025	Melakukan kajian-kajian terkait : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesesuaian produk dan/atau jasa yang sudah ada dengan kriteria kegiatan usaha ▪ Permintaan pasar terhadap produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan 	Telah dilakukan kajian terhadap pembiayaan usaha yang ada dan hasilnya dijadikan sebagai acuan pembuatan SOP

1.5 Penanggungjawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan

Secara keseluruhan Aksi Keuangan Berkelanjutan dikelola oleh Bagian Manajemen Risiko, dengan didukung oleh Bagian Investasi, Bagian Operasional dan Bagian SDM. Adapun rincian unit kerja berikut dengan pejabat yang berkaitan dengan Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan

Pejabat	Tugas & Wewenang
Direksi	Bertanggungjawab terhadap pengelolaan Program Aksi Keuangan Berkelanjutan secara keseluruhan
Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ▪ Bertanggung jawab kepada Direksi terhadap pengelolaan Program Aksi Keuangan Berkelanjutan secara keseluruhan melalui laporan RAKB dan laporan berkelanjutan yang diserahkan kepada OJK.
Bagian Investasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendukung melalui data untuk penyusunan RAKB ▪ Memproyeksikan Pertumbuhan Penyaluran Kredit Kepada Kegiatan Usaha ▪ Menyalurkan pembiayaan kepada kegiatan usaha berkelanjutan. ▪ Mengelola Program Aksi Keuangan Berkelanjutan
Bagian Operasional (Akunting, Keuangan, dan Administrasi Investasi)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaporan Bulanan Realisasi Penyaluran Kredit kepada Kegiatan Usaha ▪ Monitoring Penyaluran Dana Kegiatan Usaha Berkelanjutan
Bagian SDM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apabila diperlukan merekrut karyawan untuk mengisi unit khusus pengelola keuangan berkelanjutan ▪ Membuat SK penunjukan/penugasan kepada karyawan untuk pengelolaan dan pembuatan laporan RAKB dan laporan berkelanjutan. ▪ Mengadakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi atau edukasi eksternal terkait program keuangan berkelanjutan dan penyusunan anggaran untuk kegiatan pelatihan tersebut. ▪ Menyusun Pedoman Perusahaan Aksi Keuangan Berkelanjutan ▪ Menyusun pedoman internal yang mendukung praktek ramah lingkungan dalam kegiatan operasional BDF



2.1 Rujukan yang Digunakan Sebagai Acuan

Rujukan yang digunakan sebagai acuan BDF dalam menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2025 yaitu :

- a. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II di Indonesia 2021 – 2025.
- b. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.
- c. Surat Keputusan No. 002/SBV/KOM/VI/2020 tentang Pedoman Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi PT. Sarana Bali Ventura tanggal 30 Juni 2020.

2.2 Proses Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)

Sebagaimana tercantum dalam POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, BDF yang merupakan Perusahaan Modal Ventura berkewajiban menerapkan aksi keuangan berkelanjutan mulai tanggal 1 Januari 2020.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RAKB BDF Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Direksi,
- Divisi Investasi,
- Bagian Manajemen Risiko,
- Bagian Operasional (Akunting, Keuangan, Administrasi) dan
- Bagian SDM.

Direksi berperan dalam memberikan arahan serta menentukan prioritas termasuk mengajukan persetujuan kepada Dewan Komisaris. Dalam proses penyusunan ini, BDF belum menggunakan jasa pihak ketiga atau konsultan.



3.1 Rencana Strategis PT Bali Kerthi Development Fund Ventura (BDF)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BDF merujuk kepada Anggaran Dasar Perusahaan No.79 tanggal 10 Desember 1994, sebagai mana telah diubah terakhir dengan Akta Perubahan No.33 tanggal 29 Oktober 2024. Dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi, BDF telah menyusun rencana strategis sebagai berikut :

- Rencana Jangka Panjang (5 tahunan) berupa Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) Tahun 2020 – 2025
- Rencana Bisnis Tahunan 2025, merupakan rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan Rencana Bisnis Tahunan BDF yang sudah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

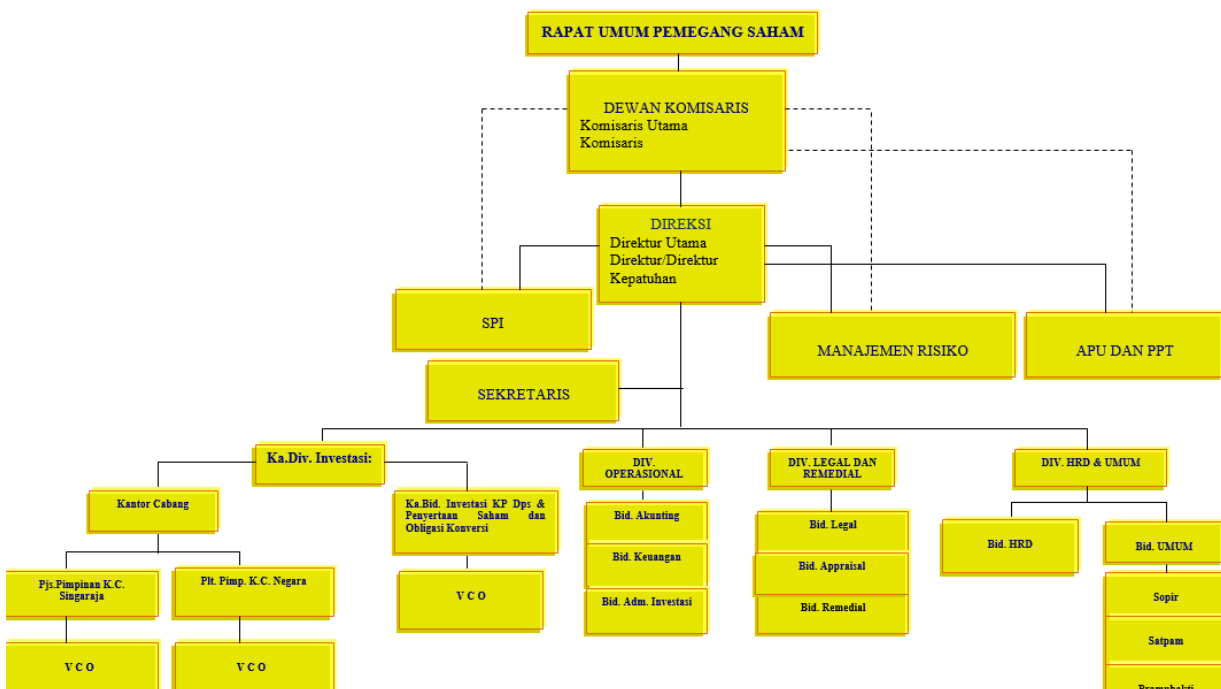
3.2 Kapasitas Organisasi Saat Ini

3.2.1 Struktur Organisasi

Dalam mencapai target serta visi dan misi perusahaan, BDF akan melakukan penyesuaian struktur organisasi sesuai kebutuhan, arah dan pengembangan bisnis yang dilakukan. Adapun struktur organisasi BDF pada saat penyusunan RAKB tahun 2025 adalah sebagai berikut:



**STRUKTUR ORGANISASI
PT BALI KERTHI DEVELOPMENT FUND VENTURA**



Adapun susunan Pengurus Perseroan berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bali Kerthi Development Fund Ventura Nomor 33 tanggal 29 Oktober 2024, yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Selamat, S.H., susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bali Kerthi Development Fund Ventura per 31 Oktober 2024 adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama	: I Ketut Widiana Karya
Komisaris	: Ngakan Putu Miharjana
Direktur Utama	: I Made Gunawirawan
Direktur	: Anak Agung Istri Agung Maharani

3.2.2 Sumber Daya Manusia

Bagi Perusahaan, aspek Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu aset utama sebagai penggerak utama dalam pencapaian kinerja keberlanjutan. Maka dari itu, Perusahaan sangat memperhatikan faktor SDM sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas, kompetensi, karakter, karier, serta kesejahteraan karyawan untuk pencapaian kinerja keberlanjutan Perusahaan. Perusahaan secara bertahap akan mengembangkan pengetahuan seluruh karyawan terkait keuangan keberlanjutan, sehingga dapat mendukung kelancaran aktivitas yang telah direncanakan untuk mencapai indikator dan target RAKB.

a. Jumlah dan Komposisi Karyawan

BDF melakukan optimalisasi sesuai dengan kebutuhan operasional BDF.

Tabel 3.2 Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Karyawan		Total
		L	P	
1	Pasca Sarjana (S2)	1	-	1
2	Sarjana (S1)	4	8	12
3	Diploma (D1)	-	1	1
4	SMA/ sederajat	5	3	8
Jumlah		10	12	22

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa komposisi jumlah karyawan didominasi oleh karyawan dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 12 orang atau 55% dari jumlah karyawan, dan dari 55% nya atau 12 orang merupakan karyawan wanita (karyawati).



Tabel 3.3 Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia Tahun 2024

No	Usia (Tahun)	Jumlah Karyawan		Tota I
		L	P	
1	20-30	-	4	4
2	31-40	2	3	5
3	41-50	5	3	8
4	51-70	3	2	5
Jumlah		10	12	22

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa komposisi jumlah karyawan didominasi oleh karyawan dengan rentang usia 41-50 tahun dengan jumlah masing-masing 8 orang atau 36% dari jumlah karyawan.

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia

BDF melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia berupa peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan karyawan sesuai arah dan tujuan organisasi, setidaknya minimal satu kali dalam setahun untuk meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri.

b. Praktek Ketenagakerjaan yang Humanis

BDF berkomitmen untuk melaksanakan praktek pengelolaan sumber daya manusia dan hubungan ketenagakerjaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini diwujudkan diantaranya dengan penetapan standar upah karyawan, penerapan Kesetaraan dan non diskriminasi, tidak mempekerjakan pekerja anak dan pekerja muda serta tidak menerapkan praktek kerja paksa.

3.2.3. Jaringan Kantor Layanan

Dalam rangka memberikan kemudahan akses terhadap produk dan layanan, BDF mempunyai 3 kantor yaitu:

Kantor Pusat :Denpasar

Kantor Cabang :Kantor Cabang Singaraja

:Kantor Cabang Negara



3.3 Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis Saat ini

3.3.1. Kondisi Keuangan BDF

Pencapaian kinerja keuangan BDF Per 31 Desember 2024 (Prognosa) dibandingkan dengan target (Perubahan RBT 2024) dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kinerja Keuangan PT Bali Kerthi Development Fund Ventura

RBT Perubahan 2024 dibandingkan dengan Prognosa Per 31 Desember 2024

**PT BALI KERTHI DEVELOPMENT FUND VENTURA
HIGHLIGHT PROGNOSA LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN
TAHUN 2024**

KETERANGAN	RBT Perubahan 31 Des 2024	Prognosa 31 Des 2024	(dalam ribu rupiah)	
			RBT Perubahan 2024	vs Prognosa 2024
			Rp	%
A Aktiva	37.586.895	28.887.301	(8.699.594)	-23,15%
B Deposito	1.350.000	1.500.000	150.000	11,11%
C Investasi	33.844.010	25.048.283	(8.795.727)	-25,99%
Schat	32.355.934	24.400.236	(7.955.698)	-24,59%
Bermasalah	1.488.076	648.047	(840.029)	-56,45%
D Non Performing Investmentand Financing (NPIF) Bruto	4,40%	2,59%		-1,81%
Non Performing Investmentand Financing (NPIF) Neto	3,39%	1,23%		-2,16%
E CKPN	846.481	672.031	(174.450)	-20,61%
F AYDA	662.917	737.917	75.000	11,31%
G UTANG	16.411.775	8.221.691	(8.190.084)	-49,90%
H EKUITAS	21.175.120	20.665.610	(509.510)	-2,41%
I LABA (RUGI)				
Pendapatan Operasional :				
Pendapatan Dana Sendiri	3.657.463	3.076.325	(581.138)	-15,89%
Provisi & Administrasi	430.090	240.779	(189.312)	-44,02%
Pendapatan PKBL Pertamina	543	543	0	0,00%
Pendapatan LPDB KUKM	125.097	136.114	11.017	8,81%
Pendapatan PKBL PPA	13.443	19.817	6.374	47,42%
Pendapatan PKBL Jasa Raharja	10.026	15.941	5.915	59,00%
Pendapatan PKBL AP II	2.856	3.048	192	6,72%
Pendapatan Operasional Lainnya	12.033	13.433	1.400	11,63%
Pendapatan UMK Peruri	12.945	13.912	967	7,47%
Laba (Rugi) Penyertaan Saham / Kupon OK	241.085	243.285	2.200	0,91%
Pendapatan UMK Jasa Marga	17.211	19.140	1.929	11,21%
Total Pend. Operasional	4.522.792	3.782.337	(740.455)	-16,37%
Biaya Operasional				
Biaya Pegawai	2.769.471	2.771.145	1.674	0,06%
Biaya Perjalanan Dinas	133.095	135.815	2.720	2,04%
Biaya Pengembangan SDM	18.000	692	(17.308)	-96,16%
Biaya Imbal Jasa Pasca Kerja	189.696	220.627	30.931	16,31%
Biaya Umum & Administrasi	431.318	394.141	(37.177)	-8,62%
Biaya Sewa	57.500	57.500	0	0,00%
Biaya Profesional	225.825	238.582	12.757	5,65%
Biaya Bunga Pinjaman LPDB KUKM	163.147	164.400	1.253	0,77%
Biaya Bunga Pinjaman PKBL Pertamina	792	792	0	-0,04%
Biaya Bunga Pinjaman AP II	333	333	0	0,10%
Biaya Bunga Pinjaman PPA	928	918	-10	-1,12%
Biaya Bunga Pinjaman Jasa Raharja	521	1.042	521	99,94%
Biaya Bunga Pinjaman Bank BPD Bali	323.958	147.595	(176.363)	-54,44%
Biaya Bunga Pinjaman UMK Peruri	1.347	1.335	(12)	-0,88%
Biaya Bunga Pinjaman UMK Jasa Marga	1.696	1.684	(12)	-0,69%
Biaya Penyisihan	174.200	-	(174.200)	-100,00%
Biaya Depresiasi	198.859	151.152	(47.707)	-23,99%
Total Biaya Operasional	4.690.686	4.287.752	(402.934)	-8,59%
LABA (RUGI) OPERASIONAL	-167.894	(505.416)	(337.522)	201,03%
Pend. Non Operasional :				
Bunga Deposito	43.278	53.640	10.362	23,94%
Non Opr Lainnya	210.213	17.370	(192.843)	-91,74%
Biaya Non Operasional :				
Biaya Administrasi Bank	6.650	7.875	1.225	18,42%
Laba (Rugi) sebelum pajak	78.947	(442.281)	(521.228)	-660,22%
Beban Pemeriksaan Pajak	-	-	-	-
Pajak penghasilan ps 25	39.000	27.282	(11.718)	-30,05%
Beban (Penghasilan) Pajak Tangguhan	-	-	-	-
LABA (RUGI) STH PAJAK	39.947	(469.562)	(509.509)	-1275,46%
RATIO - RATIO				
A INVESTMENT RATE (TOTAL)	13,44%	13,44%		0,00%
B INVESTMENT RATE (Pend.Bunga)	13,38%	15,37%		1,99%
C INVESTMEN RATE (Inv. BH sehat)		14,12%		14,12%
D INVESTMEN RATE (Inv. BH bermasalah)		6,61%		6,61%
C INVESTMENT RATE (Deposito)	2,80%	2,47%		-0,33%
D NET INTEREST MARGIN (TOTAL)	12,06%	13,44%		1,38%
E COST OF MONEY				0,00%
E OVERHEAD COST	11,94%	13,99%		2,05%
F PROFIT MARGIN	0,44%	-1,78%		-2,22%
G RETURN ON EQUITY	0,19%	-2,24%		-2,43%
H RETURN ON ASSET	0,12%	-1,62%		-1,74%
I CURRENT RATIO	39,49%	53,32%		13,83%
J CASH RATIO	14,46%	23,45%		8,99%
K RATIO DANA VENTURA	-	-		-
L RATIO KEGIATAN UMKM THP TOTAL KEGIATAN USAHA	87,53%	86,17%		-1,36%
M BOPO	103,71%	113,36%		9,65%

1. Total aset per 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp.28,887 miliar atau Rp.8,699 miliar (23,15%) dibawah proyeksi, hal ini disebabkan karena total utang terealisasi Rp.8,221 miliar (49,90%) dibawah proyeksi dan total ekuitas terealisasi Rp.20,665 miliar (2,41%) dibawah proyeksi.
2. Total outstanding Investasi (bruto) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 25,048 miliar atau Rp. 8,795 miliar dibawah proyeksi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Investasi terealisasi Rp. 11,131 miliar dari Rp. 20,365 miliar yang ditargetkan.
 - Divestasi terealisasi sebesar Rp. 11,788 miliar dari Rp. 18,231 miliar yang diperkirakan.
3. NPIF Netto per 31 Desember 2024 adalah 1,23% atau 2,16% dibawah proyeksi .
4. Total utang terealisasi sebesar Rp. 8,221 miliar atau Rp. 8,190 miliar (49,90%) di bawah proyeksi. Hal ini disebabkan karena pinjaman komersial (Bank BPD Bali) terealisasi Rp. 6,5 miliar dari yang diproyeksikan sebesar Rp. 15 miliar.
5. Total ekuitas per 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp. 20,665 miliar atau Rp. 509 juta (2,41%) dibawah proyeksi yang disebabkan karena laba (rugi) setelah pajak terealisasi rugi Rp. 469 juta atau (509) juta dibawah proyeksi.
6. Pendapatan operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 3,782 miliar atau 740 juta (16,37%) dibawah proyeksi yang disebabkan karena :
 - Pendapatan bunga (dana sendiri, LPDB, UMK) terealisasi Rp. 554 juta dibawah proyeksi.
 - Pendapatan Provisi dan administrasi fee terealisasi Rp. 189 juta dibawah proyeksi.
 - Pendapatan obligasi konversi terealisasi Rp. 2,2 juta diatas proyeksi.
 - Pendapatan operasional lainnya terealisasi Rp. 1,4 juta diatas proyeksi
7. Biaya operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp. 402 juta dibawah proyeksi. Tiga pos biaya terbesar yang terealisasi dibawah proyeksi adalah biaya bunga, biaya penyisihan dan biaya administrasi dan umum.
8. Pendapatan (beban) lainnya sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi Rp. 181 juta dibawah proyeksi, yang disebabkan karena pendapatan bunga deposito terealisasi Rp. 10 juta diatas proyeksi, pendapatan non operasional lainnya terealisasi Rp. 192 juta dibawah proyeksi dan biaya lainnya terealisasi Rp. 1,2 juta diatas proyeksi.
9. Laba (rugi) perusahaan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 rugi sebesar Rp. 469 juta atau terealisasi (Rp.509) juta dibawah proyeksi yang disebabkan karena total pendapatan operasional terealisasi Rp. 740 juta (16,37%) dibawah proyeksi, total biaya operasional terealisasi Rp. 402 juta (8,59%) dibawah proyeksi, pendapatan (beban) lainnya terealisasi sebesar 181 juta dibawah proyeksi.



3.3.2. Produk dan Layanan BDF

BDF melakukan kegiatan usaha Modal Ventura kategori VDC (*Venture Debt Corporation*), sesuai POJK Nomor 25 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS).

Pembiayaan PMV menyelenggarakan kegiatan Usaha Modal Ventura yang meliputi:

1. Penyertaan Modal (Equity Participation).
2. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*Quasi equity participation*).
3. Pembiayaan melalui surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.
4. Pembiayaan .

Kegiatan Usaha Kategori VDC (*Venture Debt Corporation*) adalah perusahaan yang fokus pada pembiayaan melalui pembelian surat utang/sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha, pembiayaan, dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

3.3.3. Kapasitas Teknis

Terkait kapasitas teknis saat ini, dimana produk jasa keuangan yang disalurkan kepada calon debitur/pasangan usaha adalah pembiayaan

usaha produktif, penyertaan saham dan/atau penyertaan melalui obligasi konversi (karena disesuaikan dengan sumber dana yang dimiliki BDF), maka akses terhadap teknologi yang relevan, seperti sistem pelaporan dan pemantauan sangat penting. Layanan teknis yang diberikan adalah terkait pembayaran angsuran yang dapat dilakukan melalui jasa perbankan baik transfer maupun setor tunai yang mana saat ini perbankan telah menyediakan kemudahan untuk proses ini baik dengan internet banking maupun sms banking. Dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini, menyebabkan masyarakat ikut dalam perubahan perilaku yang menginginkan kemudahan, keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Kedepan, BDF akan berupaya untuk meningkatkan kapasitas teknis teknologi, tidak hanya untuk proses pembayaran angsuran namun untuk proses pengajuan pembiayaan.

- a. Untuk kapasitas teknis berupa sistem yang digunakan untuk pelaporan aktivitas keuangan perusahaan, BDF menggunakan *Focus Loan Management System (FLMS)* yang berbasis web, FLMS adalah sebuah *core system* yang dapat mengakomodir proses pembiayaan dan keuangan yang berjalan di PT Bahana Artha Ventura (BAV) dan seluruh Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD) termasuk BDF.



Saat ini BDF melakukan kerjasama dengan PT Sevanam Teknologi Solusindo (vendor) untuk menyediakan aplikasi Layanan Sistem Keuangan Online (SKO), sebagai pengganti FLMS. BDF selalu menerapkan sistem back up data yang dilakukan oleh masing-masing bagian. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisasi adanya kemungkinan gangguan sistem, jaringan, kerusakan data hingga bencana alam.

- b. BDF juga sudah menerapkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK sejak BDF ditetapkan sebagai pelapor SLIK pada bulan September 2021. SLIK merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. SLIK dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan, penilaian kualitas debitur, pengelolaan sumber daya manusia pada pelapor SLIK, verifikasi untuk kerja sama pelapor SLIK dengan pihak ketiga, dan meningkatkan disiplin industri keuangan.

3.4 Strategi Komunikasi

3.4.1. Faktor Internal

1. Komunikasi Internal

Dalam hal penetapan tujuan dan prioritas keuangan berkelanjutan beserta penerapan dan implementasinya, komitmen serta dukungan dari

Manajemen merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penentu dari terlaksananya program-program yang telah direncanakan. Menginformasikan kepada seluruh karyawan tentang pentingnya RAKB dan melibatkan mereka dalam proses implementasi.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan aksi keuangan berkelanjutan, perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai, disesuaikan dengan kapasitas usaha BDF. Infrastruktur, perangkat lunak, dan teknologi yang mendukung sudah mencukupi.

3. Kompetensi Pegawai

Salah satu faktor penting dalam menjalankan prinsip keuangan berkelanjutan adalah kompetensi pegawai yang memadai. Oleh karena itu, BDF akan konsisten berupaya untuk membentuk sumber daya manusia yang handal melalui pembekalan melalui pendidikan dan pelatihan khususnya yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan. Selain itu, BDF berupaya mengembangkan organisasi untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi keuangan berkelanjutan.

4. Komunikasi Eksternal

Mengkomunikasikan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan kepada pemangku kepentingan eksternal, seperti investor, pelanggan dan masyarakat.



3.4.2. Faktor Eksternal

1. Lingkungan dan iklim yang sehat merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. Menciptakan lingkungan yang sehat dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip go green dalam kegiatan sehari – hari, antara lain menggunakan kertas secara bolak-balik, mematikan perangkat elektronik yang sudah tidak digunakan, menggunakan air secara lebih bijaksana, pengelolaan sampah dan lain sebagainya. BDF memastikan bahwa daerah kedudukan setiap jaringan kantor tidak mengganggu keseimbangan ekosistem di sekitarnya. BDF mendukung strategi transformasi Ekonomi Bali dengan pilarnya “Bali Hijau”.
2. Kondisi perekonomian regional dan nasional merupakan faktor eksternal yang sangat dinamis dan dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan RAKB. BDF perlu secara proaktif memantau perkembangan kondisi ekonomi dan menyesuaikan RAKB-nya agar tetap relevan dan efektif. Dengan demikian, BDF dapat membangun ketahanan bisnis yang lebih kuat dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan
3. Kebijakan Pemerintah, Regulasi, pemberian insentif dan investasi pemerintah terkait

lingkungan sosial dan tata kelola (ESG) akan berdampak langsung pada RAKB perusahaan. Kondisi Sosial dan Budaya

4. Kondisi sosial dan budaya merupakan salah satu kunci bagi pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan Aksi Keuangan Berkelanjutan perlu memperhatikan faktor sosial dan menjunjung nilai kearifan lokal Sad Kerthi. BDF mempunyai tanggung jawab moral kepada masyarakat sebagai *agent of development* yaitu dengan memberikan manfaat berupa *Corporate Social Responsibility (CSR)* kepada pihak-pihak yang layak. Selain itu, kegiatan bisnis BDF seperti pemberian kredit mempertimbangkan bidang dan jenis usaha debitur agar tidak disalah gunakan untuk usaha yang bersifat negatif.
5. Pengawasan yang sehat dan efektif merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan Aksi Keuangan Berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya informasi yang asimetris antara faktor-faktor yang terlibat dalam aktivitas operasional khususnya dalam implementasi program-program keuangan berkelanjutan.



3.5 Sistem Monitoring, Evaluasi dan Mitigasi

3.5.1 Sistem Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka melakukan monitoring atas kinerja seluruh bagian dalam perusahaan, mekanisme yang dilakukan antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris, merupakan rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan yang membahas kinerja perusahaan baik kinerja keuangan maupun non keuangan untuk periode tertentu. Rapat Dewan Komisaris ini dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dalam 1(satu) tahun.
2. Rapat Direksi, merupakan rapat antara Direksi dan karyawan yang membahas kinerja masing-masing bagian, hal-hal terkait kendala dalam melaksanakan pekerjaan masing-masing bagian serta solusinya juga dibahas dalam rapat ini. Rapat Direksi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
3. Rapat Lainnya yang biasa dilaksanakan Direksi dan karyawan bagian tertentu untuk membahas program kerja bagian yang bersangkutan. Waktu pelaksanaan rapat tergantung kebutuhan pembahasan yang harus dilakukan.

3.5.2 Mitigasi

BDF telah mempunyai bagian Manajemen Risiko dan Audit internal (SPI) dalam upaya memitigasi risiko, memonitor kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan risiko dalam lingkup aktivitas BDF dilaksanakan sesuai ketentuan OJK, yakni meliputi 8 (delapan) jenis risiko yakni Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi dan Risiko Strategik.

3.6 Kerjasama dengan Pihak Eksternal

Kerjasama dengan pihak eksternal membawa banyak manfaat dalam pelaksanaan RAKB yaitu :

- Akses terhadap keahlian khusus
- Jaringan luas
- Perspektif yang berbeda
- Sumber daya tambahan
- Akses ke informasi terkini

Kerjasama dengan pihak eksternal merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat RAKB. Dengan melibatkan berbagai pihak yang relevan, perusahaan dapat memperoleh manfaat yang signifikan dalam mencapai tujuan keberlanjutan jangka panjang.



4.1 Dasar Pemikiran

4.1.1 Prioritas Implementasi Keuangan Berkelanjutan

BDF menetapkan prioritas implementasi Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan Pedoman Teknis POJK No. 51/POJK.03/2017 dan memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal sebagaimana telah disebutkan dalam Bab 3 Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan BDF tahun 2025. Dalam rangka mengimplementasikan keuangan berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam *Road Map* Aksi Keuangan Berkelanjutan BDF tahun 2020-2025, pada tahun 2025 BDF Melakukan kajian-kajian terkait kesesuaian produk dan/atau jasa yang sudah ada dengan kriteria kegiatan usaha, permintaan pasar terhadap produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan.

4.1.2 Kriteria dan Alasan Pemilihan Prioritas Implementasi Keuangan Berkelanjutan

Secara umum, tantangan eksternal yang dihadapi terkait implementasi keuangan berkelanjutan dari sudut pandang eksternal adalah masih rendahnya pemahaman mengenai penerapan keuangan berkelanjutan dan kurangnya perhatian serta kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan dari sudut pandang internal adalah belum memadainya pemahaman karyawan terhadap penerapan aksi keuangan berkelanjutan serta keterbatasan jumlah sumber daya manusia BDF saat ini.

Kendati demikian, pengembangan akan terus diupayakan dan apabila diperlukan serta jumlah sumber daya manusia di BDF memadai, akan dibentuk unit khusus untuk menangani kegiatan aksi keuangan berkelanjutan tentu saja juga harus ditunjang dengan peningkatan kompetensi dibidang keuangan berkelanjutan.

4.1.3 Uraian Aktivitas Implementasi Keuangan Berkelanjutan

Adapun aktivitas dari implementasi Program Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

a. Penunjukan petugas

Pedoman Teknis POJK No. 51/POJK.03/2017 menyebutkan bahwa dalam rangka penyesuaian struktur organisasi dapat dilakukan dengan menambah tupoksi Keuangan Berkelanjutan pada unit yang sudah ada atau menambah unit khusus yang menjalankan program-program Keuangan Berkelanjutan. BDF tidak membentuk unit khusus tapi secara keseluruhan aksi keuangan berkelanjutan dikelola oleh Manajemen Risiko dibantu dan didukung oleh bagian investasi, bagian operasional dan bagian sumber daya manusia (SDM). Pengelola keuangan berkelanjutan yang berada dibawah supervisi Manajemen Risiko akan selalu berkoordinasi dengan divisi Investasi sebagai supervisi untuk program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk keselarasan kegiatan dan pelaporan termasuk juga dalam hal penyusunan laporan berkelanjutan.



b. Penyusunan Pedoman Perusahaan Keuangan Berkelanjutan.

Dalam rangka memastikan penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan selaras dengan berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai Keuangan Berkelanjutan dan ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai isu sosial dan lingkungan hidup, telah disusun Pedoman Perusahaan Keuangan Berkelanjutan. Pedoman ini juga dibutuhkan untuk menjadi panduan bagi Pengelola Keuangan Berkelanjutan untuk melaksanakan program dan aktivitas Keuangan Berkelanjutan.

c. Pelaksanaan edukasi internal bekerjasama dengan berbagai pihak eksternal seperti regulator dan lembaga/instansi terkait lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dibutuhkan edukasi internal secara menyeluruh. Adapun edukasi internal yang akan dilaksanakan mencakup sebagai berikut:

- Peningkatan Kapasitas Pengurus terkait Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan
- Peningkatan kompetensi karyawan tentang Aksi Keuangan Berkelanjutan
- Melakukan pelatihan kepada karyawan
- Pelatihan Penyusunan Laporan Berkelanjutan kepada karyawan Manajemen Risiko, dan karyawan lain yang menangani keuangan berkelanjutan.

- Kampanye peduli lingkungan kepada seluruh karyawan BDF

d. Implementasi target dan alokasi dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Aksi Keuangan Berkelanjutan, BDF melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menekankan kepada sektor pendidikan, kepedulian sosial, UKM, ketertiban umum dan pelestarian lingkungan hidup.



4.2 Kegiatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Adapun secara rinci kegiatan rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggungjawab
1	Penunjukan Manajemen Risiko sebagai petugas yang menyusun RAKB dan laporan Berkelanjutan	Maret 2020	Juni 2020	SDM	SDM
2	Penyusunan Pedoman Perusahaan Keuangan Berkelanjutan, telah dibentuk dan disusun sesuai target di tahun 2020	Maret 2020	Oktober 2020	Unit Kerja Terkait : ▪ Investasi ▪ SDM	Manajemen Risiko
3	Pelaksanaan edukasi Keuangan Berkelanjutan	Oktober 2021	Desember 2021	▪ SDM/HRD ▪ Investasi ▪ Umum	SDM/HRD
4	Penyusunan pedoman internal yang mendukung praktek ramah lingkungan dalam kegiatan operasional BDF	Maret 2022	Juni 2022	Unit Kerja Terkait : ▪ Investasi ▪ SDM/HRD	Manajemen Risiko
5	Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mengelola fungsi keuangan berkelanjutan	Maret 2022	Oktober 2022	SDM	SDM
6	Inisiasi portofolio produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan	Maret 2023	Juni 2023	Unit Kerja Terkait : ▪ Investasi ▪ Umum	Manajemen Risiko
7	Pelaksanaan edukasi eksternal	Maret 2023	Oktober 2023	▪ Investasi ▪ SDM/HRD	
8	Pengembangan portofolio produk dan/jasa keuangan berkelanjutan	Maret 2024	Juni 2024	▪ Investasi ▪ Umum	Manajemen Risiko
9	Menyusun sistem pengawasan dan pelaporan penerapan keuangan berkelanjutan.	Juni 2024	Oktober 2024	▪ SDM/HRD	SDM
10	Kesesuaian produk dan/atau jasa yang sudah ada dengan kriteria kegiatan usaha	Maret 2025	Juni 2025	▪ Investasi ▪ SDM	Manajemen Risiko
11	Permintaan pasar terhadap produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan	Juni 2025	Oktober 2025	▪ Investasi ▪ Umum	Manajemen Risiko

4.3 Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL)

Dalam rangka meningkatkan nilai tambah kepada segenap pemangku kepentingan, BDF mengimplementasikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BDF sebagai bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas perusahaan. Implementasi dari program TJSL, BDF berpijak pada konsep pemberdayaan yang berkelanjutan, mendukung program kerja Pemerintah Provinsi Bali di bidang pemberdayaan masyarakat dan selaras dengan pengembangan bisnis BDF

a. Sektor Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan

Transformasi Ekonomi Bali adalah proses pembangunan ekonomi yang memiliki dampak jangka Panjang, yang mencakup 6(enam) strategi besar dan dijalankan dengan berbagai program pembangunan, yaitu:

- 1. Bali Pintar dan Sehat**, melalui transformasi pembangunan kesehatan dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bali. Peningkatan kualitas SDM melalui strategi mewujudkan SDM sehat bergizi, SDM cerdas berkarakter kuat dan SDM yang kreatif dan inovatif.
- 2. Bali Produktif**, melalui strategi peningkatan produktivitas tenaga kerja menuju pekerja kelas menengah, modernisasi pertanian, modernisasi kelautan dan perikanan, peningkatan 16(enam belas) industrialisasi, penguatan sector pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan penguatan UMKM

dan penguatan sector pariwisata, produktivitas tenaga kerja Bali akan mengalami peningkatan sebesar 3 (tiga) kali lipat dibandingkan rata-rata produktivitas tahun 2015-2019.

- 3. Bali Hijau**, melalui scenario penerapan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang ambisius, sehingga tercapai penurunan *Green House Gases* (GHG) di level *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat, dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di sector ekonomi hijau antara 50.000 sampai 100.000 lapangan pekerjaan baru.
- 4. Bali Terintegrasi**, melalui peningkatan sarana dan prasarana konektivitas, pengembangan Bali sebagai hub logistic udara, penguatan kerjasama Bali-Nusra, serta pengembangan skema inovatif pembiayaan infrastruktur.
- 5. Bali Smart Island**, melalui penguatan infrastruktur digital (100% coverage dan berkualitas), peningkatan SDM trampil digital, pengembangan berbagai pelayanan publik dan swasta secara digital serta digitalisasi perekonomian Bali antara lain digitalisasi startup UMKM dan ekonomi kreatif, dan pengembangan layanan wisata digital.
- 6. Bali Kondusif**, melalui penguatan enabler atau factor pengungkit pertumbuhan ekonomi jangka panjang, yaitu: aspek keuangan daerah, aspek pembiayaan usaha, dari aspek kemudahan berusaha, dan aspek reformasi birokrasi, serta perbaikan tata kelola dan kelembagaan.



b. Rencana Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) BDF Tahun 2025

Untuk program TJSL di tahun 2025 yang berkaitan dengan Pembangunan Berkelanjutan, BDF merencanakan menyalurkan dana sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan berkelanjutan sebagai berikut :

Tabel 4.2 Rencana Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) BDF Tahun 2025

Jenis Kegiatan CSR	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Penjelasan
Program bantuan dan penyediaan tong sampah di Singaraja	Kebersihan dan kesehatan masyarakat.	Alokasi dana Rp 10.000.000,- periode pelaksanaan bulan Oktober 2025.

c. Kegiatan Literasi & Inklusi Keuangan

PT Bali Kerthi Development Fund Ventura (BDF) turut serta mendukung program literasi keuangan yang diinisiasi oleh pemerintah. Kegiatan literasi & inklusi keuangan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan perencanaan keuangan, pengenalan produk/jasa keuangan (manfaat, risiko, hak, dan kewajiban) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Selain memenuhi ketentuan regulasi, kegiatan edukasi dan literasi keuangan juga dimaksudkan untuk lebih memperkenalkan BDF kepada masyarakat. Untuk tahun 2025 kegiatan literasi & inklusi akan dilakukan di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Singaraja. Rencana kegiatan akan dilakukan pada bulan Juni dan Oktober 2025, pelaksanaan kegiatan bisa dilaksanakan secara langsung dan/ atau daring (online).

4.4 Sumber Daya

4.4.1 Pihak yang Bertanggungjawab

BDF menugaskan Manajemen Risiko sebagai pengelola aktivitas dan program kerja Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan tugas dan tanggung jawab penyusunan RAKB tahun 2025. Dalam laporan berkelanjutan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terkait dengan Aksi Keuangan Berkelanjutan bagian Manajemen Risiko berkoordinasi dengan sejumlah unit sebagai berikut:



Tabel 4.3 Unit Terkait Kegiatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Aktivitas/Program Kerja	Unit Kerja Terkait
Penunjukan Manajemen Risiko	Bagian Sumber Daya Manusia
Penyusunan Pedoman Perusahaan Keuangan Berkelanjutan	Bagian Sumber Daya Manusia
Pelatihan Terkait Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan	Bagian Investasi - Bagian Sumber Daya Manusia - Bagian Investasi
Monitoring Realisasi Penerapan Penyaluran Kredit Kepada Kegiatan Usaha Keberlanjutan	- Bagian Operasional (Akuntansi, Keuangan, dan Administrasi Investasi)
Pelaporan Realisasi Penyaluran Kredit Kepada Kegiatan Usaha Berkelanjutan.	

4.4.2 Anggaran

Rencana anggaran untuk program dan aktivitas keuangan berkelanjutan BDF Tahun 2025 adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diluar dari anggaran Program TJSJL BDF. Kegiatan inklusi dan edukasi sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) serta biaya pelatihan karyawan sebesar Rp. 64.800.000 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun penyaluran kredit/pembiayaan kepada debitur dianggarkan sebesar Rp. 32.447.000.000 (tiga puluh dua miliar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah). Di dalamnya sudah termasuk kegiatan usaha berkelanjutan.

4.4.3 Pihak Ketiga

Dalam pelaksanaan program aksi keuangan berkelanjutan, PT. Bali Kerthi Development Fund Ventura apabila diperlukan akan melibatkan pihak lain / pihak ketiga dalam hal:

- a. Pelatihan, edukasi ataupun sosialisasi terkait penerapan aksi keuangan berkelanjutan
- b. Konsultasi penyusunan pedoman perusahaan tentang aksi keuangan berkelanjutan
- c. Sosialisasi/pelatihan penyusunan laporan keberlanjutan



4.5 Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Keberhasilan dari pelaksanaan Program dan Aktivitas Keuangan Berkelanjutan ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Membandingkan realisasi Program Kerja Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan timeline dan indikator kinerja lainnya yang telah direncanakan.
- b. Membandingkan realisasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan timeline, anggaran dan indikator kinerja lainnya yang telah direncanakan.
- c. Membandingkan realisasi Penyaluran Kredit kepada kegiatan usaha kategori berkelanjutan dengan anggaran dan indikator kinerja lainnya yang telah direncanakan.

Untuk melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja Program dan Aktivitas Keuangan Berkelanjutan, diperlukan sistem pelaporan terhadap realisasi Program Kerja Aksi Keuangan Berkelanjutan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Penyaluran Kredit kepada kegiatan usaha kategori berkelanjutan secara berkala.



5.1 PIC Penanggung Jawab Monitoring & Evaluasi Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam melakukan monitoring Aksi Keuangan Berkelanjutan diperlukan PIC untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan aksi keuangan berkelanjutan. Adapun *Person In Charge* (PIC) untuk monitoring & evaluasi Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

Uraian kegiatan	PIC
Monitoring realisasi penunjukan pelaksana kegiatan aksi keuangan berkelanjutan.	Bagian SDM
Monitoring realisasi penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan keuangan berkelanjutan.	Manajemen Risiko
Monitoring realisasi pelaksanaan edukasi internal terkait kegiatan aksi keuangan berkelanjutan.	Bagian SDM
Monitoring realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Bagian Investasi
Monitoring realisasi penyaluran pembiayaan ke UMKM	Bagian Operasional (Akunting, Keuangan, Administrasi Investasi)
Monitoring risiko kredit	Manajemen Risiko
Evaluasi Program Aksi Keuangan Berkelanjutan	Bagian Investasi

5.2 Penentuan Waktu Untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Untuk memastikan efektivitas realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan diperlukan pengukuran secara berkala yang dilaporkan kepada Direksi. Adapun pelaporan berikut dengan penentuan waktu untuk melakukan pengukuran realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagai berikut :

Tabel 5.2 Periode Pengukuran Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Aktivitas	Periode	PIC
Laporan Program Aksi Keuangan Berkelanjutan	Tahunan	Bagian Investasi
Laporan Realisasi Penyaluran Kredit kepada Kegiatan Usaha Kategori Berkelanjutan	Triwulan	Bagian Akunting Bagian Investasi
Laporan Berkelanjutan	Tahunan	Bagian Investasi



5.3 Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan belum dapat terimplementasi sesuai dengan program kerja dan *timeline* yang telah direncanakan, BDF akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

- a) Mengkaji ulang indikator kinerja yang digunakan untuk penyusunan RAKB periode berikutnya.
- b) Melakukan revisi atas RAKB.
- c) Mengkaji ulang pedoman pelaksanaan program aksi keuangan berkelanjutan yang disusun, jika terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan maka akan dilakukan penyesuaian.

5.4 Mitigasi Risiko

5.4.1 Pemetaan Risiko

Tidak berjalannya Aksi Keuangan Berkelanjutan dapat berdampak pada sejumlah jenis risiko yang dikelola BDF. Adapun pemetaan risiko terhadap Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3 Pemetaan Risiko Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan

Jenis Risiko	Potensi Risiko
Risiko Kredit	Pelaku kegiatan usaha kategori berkelanjutan gagal memenuhi kewajibannya
Risiko Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis karena tidak menerapkan Aksi Keuangan Berkelanjutan • Berpengaruh terhadap nilai Tingkat Kesehatan BDF
Risiko Stratejik	<ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian kinerja Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan • Pencapaian kinerja penyaluran kredit kepada Kegiatan Usaha Kategori Berkelanjutan
Risiko Reputasi	<ul style="list-style-type: none"> • Opini tidak memiliki kepedulian terhadap isu ekonomi berkelanjutan dan isu lingkungan hidup jika BDF tidak menerapkan Aksi Keuangan Berkelanjutan • Reputasi negatif dari otoritas dikarenakan BDF yang tidak menerapkan Aksi Keuangan Berkelanjutan akan diberikan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis



5.4.2 Manajemen Risiko Atas Program Aksi Keuangan Berkelanjutan

a. Tata Kelola Risiko

1. Pembentukan tim kerja pengelola keuangan berkelanjutan
2. Penyusunan Kebijakan berupa Pedoman Pengelolaan Keuangan Berkelanjutan.
3. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi terhadap penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan termasuk kepada penyaluran kredit kepada Kegiatan Usaha Kategori Berkelanjutan.
4. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki *awareness* dan pemahaman yang baik mengenai manajemen Risiko Reputasi. Pengurus melakukan peran dan tanggung jawabnya dan menjadi *role model* dalam rangka meningkatkan citra BDF kepada *stakeholder*.
5. Penanganan setiap berita yang terkait dengan BDF dan selalu dilakukan klarifikasi agar berita (khususnya yang bersifat negatif) tidak membahayakan bisnis BDF.
6. Penerapan RBT dan RAKB yang telah disetujui Dewan Komisaris untuk mencapai target yang telah ditentukan.

b. Kerangka Manajemen Risiko

1. Strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat risiko dan kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab. BDF telah memiliki karyawan bagian Manajemen Risiko yang berfungsi memperkuat implementasi fungsi Manajemen Risiko.
2. Kecukupan atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang sejalan dengan pengelolaan risiko seperti penetapan kewenangan memutus penyaluran pembiayaan dengan plafond tertentu oleh Direksi dan Komisaris serta batas maksimal plafond pemberian kredit kepada satu orang debitur sesuai ketentuan POJK.
3. Strategi pengelolaan risiko reputasi sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan dalam menangani masalah Risiko Reputasi akan disampaikan ke Direksi dibantu dengan bagian SPI dan Legal.
4. Rencana bisnis disusun bersama oleh Pengurus dan seluruh Pejabat BDF yang dikoordinasi oleh bagian Manajemen Risiko telah sejalan dengan sasaran strategis bisnis BDF secara keseluruhan serta telah disosialisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. Manajemen konsentrasi terhadap target pencapaian yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan performa layanan.
5. Menjaga seluruh kebijakan dan prosedur yang telah dibuat serta melaksanakan fungsi masing-masing bagian sesuai dengan kebijakan & prosedur yang telah ditetapkan.



c. Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi dan Sumber Daya Manusia

1. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Sistem Informasi Manajemen dan Pengendalian Risiko
2. Kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mendukung proses manajemen risiko
3. Sistem Pengendalian Risiko dilakukan dengan cara saling koordinasi antara Manajemen Risiko dan bagian lain terhadap setiap laporan yang wajib dilaporkan ke Otoritas, dimana kegiatan pemantauan tersebut telah menjadi agenda didalam kerangka kerja perbaikan tata kelola perusahaan.
4. Saling berkoordinasi setiap unit terkait dalam rangka *review* dan penyempurnaan terhadap PP/SOP/Ketentuan/Kebijakan Internal BDF guna mendukung proses bisnis.
5. Manajemen Risiko BDF secara konsisten menerapkan manajemen risiko dalam setiap aktivitas usaha termasuk pada aktivitas operasional dan non operasional. Penerapan manajemen risiko juga menjadi kepedulian setiap tingkat organisasi di BDF. Pengelolaan risiko di BDF mencakup 8 (delapan) jenis risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Risiko Pembiayaan, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Strategik, Risiko Hukum, Risiko Pasar, Risiko Reputasi dan Risiko Kepatuhan.

Perkembangan Profil Risiko					
No	Profil risiko	2020	2021	2022	2023
1	Pembiayaan	Low	Low	Low	Low
2	Likuiditas	Moderate to High	High	High	High
3	Operasional	Low to Moderate	Low	Low	Low
4	Strategik	High	Moderate	Moderate	Moderate
5	Hukum	Low	Low	Low	Low
6	Pasar	Low	Low - Moderate	Low	Low
7	Reputasi	Low	Low	Low	Low
8	Kepatuhan	Moderate	Low	Low	Low
Peringkat Komposit		Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate



PT Bali Kerthi Development Fund Ventura (BDF) sebagai perusahaan modal ventura menyadari pentingnya mengintegrasikan nilai keberlanjutan kedalam visi dan misi BDF. BDF walau kapasitas usaha masih tergolong kecil, berkeinginan dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk mencapai 17 (tujuh belas) *Sustainable Development Goals* dengan menerapkan nilai-nilai *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam kegiatan bisnis.

Demikian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025 yang dapat kami sampaikan sebagai acuan pelaksanaan di Tahun 2025. Terima kasih.

Denpasar, 20 November 2024

Hormat Kami,

DIREKSI PT BALI KERTHI DEVELOPMENT FUND VENTURA



I Made Gunawirawan

Direktur Utama



A.A.I.A Maharani

Direktur